

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DALAM MELAKSANAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN DI BPKAD KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Abdul Khalik Hidayat
NPP 28.1300
Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Keuangan Daerah

E-mail: abdkhalikhidayat@gmail.com

Abstract

The principle of decentralization that gives authority from the central government to the local government to manage all concerned with local government toxicology in accordance with the applicable Law including the obligation to utilize information technology to facilitate the process of managing financial data in order to carry out refocussing and budget reallocation. Simda Keuangan is implemented in financial management throughout opd and has achieved achievements for the presentation of financial statements but in its implementation in the field there are still weaknesses and obstacles. Using descriptive qualitative methods and inductive approaches then analyzed the data using George H.Bodnar's theory of effectiveness. The research is intended to determine the effectiveness of SIMDA Keuangan, the inhibitory factor of SIMDA Keuangan and bpkad efforts of Ternate City in overcoming the simda financial fastening factor in carrying out budget refocussing and reallocation.

Keywords: Effectiveness, SIMDA, Refocussing and Budget Reallocation, Department of Regional Financial and Asset Management (BPKAD)

Abstrak

Asas desentralisasi yang memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua yang bersangkutan dengan tupoksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku termasuk kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar mempermudah proses pengelolaan data keuangan dalam rangka melaksanakan refocussing dan realokasi anggaran. SIMDA Keuangan diterapkan dalam pengelolaan keuangan di seluruh OPD dan telah mendapatkan prestasi atas penyajian laporan keuangan namun pada pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kelemahan dan hambatan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif kemudian menganalisis data menggunakan teori Efektivitas George H.Bodnar. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas SIMDA Keuangan, faktor penghambat SIMDA Keuangan dan upaya BPKAD Kota Ternate dalam mengatasi faktor pengambat SIMDA Keuangan dalam melaksanakan refocussing dan realokasi anggaran.

Kata Kunci: Efektivitas, SIMDA, Refocussing dan Realokasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan tersebut memberikan efek yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Menurut Suwanda (2013) Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Sesuai dengan tuntutan Bangsa Indonesia saat ini yang diharuskan dengan cepat dapat bersama-sama dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih ditekankan untuk pertanggungjawaban dan lebih terbuka. Pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah no 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi salah satu bentuknya adalah direalisasikan dalam bentuk sistem informasi yang terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

Pemerintah Kota Ternate merupakan salah satu pemerintahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan melalui komputer sejak 2015 dalam pengelolaan keuangan diseluruh OPD demi terwujudnya peningkatan opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan. Secara Umum, penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di sudah berjalan baik ditandai dengan prestasi yang ditorehkan dalam kurun waktu 6 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2019 dapat mempertahankan Opini WTP yaitu Wajar

Tanpa Pengecualian atas Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, sejak digunakannya SIMDA Keuangan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

letak kantor yang mempengaruhi kualitas jaringan internet sehingga menghambat proses transfer data keuangan yang dilakukan, serta kualitas SDM yang kurang yang menghambat proses refocussing dan realokasi anggaran di BPKAD kota Ternate. sehingga faktor tersebut yang menghambat proses transfer data keuangan pada sistem informasi manajemen keuangan daerah yang ada di kota Ternate.

Situs BPKP menjelaskan bahwa SIMDA merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan Aplikasi SIMDA, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi pelaporannya.

Program Aplikasi SIMDA yang dibentuk BPKP ini terdiri atas Program Aplikasi SIMDA Keuangan, Program Aplikasi Barang Milik Daerah (BMD), Aplikasi Komputer SIMDA Gaji, dan Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan, Aplikasi SIMDA Perencanaan.

Program Aplikasi Komputer SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Melalui situs <http://www.bpkp.go.id> dijelaskan bahwa output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. Register-register; dan
 - f. Formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
- a. Jurnal;
 - b. Buku Besar;
 - c. Buku Pembantu;
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Tujuan dibentuknya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) yaitu :

- a. Sebagai tempat bertukar informasi bagi setiap unit kerja bersama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai salah satu media *control* bagi realisasi suatu program/kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dana;
- c. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* untuk unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- d. Sebagai media awal dan sarana untuk pelaksanaan *Good Government*

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa peneliti terdahulu. Penelitian Novia Citra Dewi berjudul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Pariaman* (Novia Citra Dewi 2018), menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA Keuangan yaitu belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran kas data, lemahnya data *management system*, prosedur untuk melihat data secara *incidental* masih terlalu lama, tata ruang perkantoran masih kurang memadai, seringnya *human error*, seringnya aplikasi SIMDA Keuangan *expired*, dan seringnya jaringan *offline*. Penelitian M Soleh Pulungan berjudul *Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas. Jurnal Bina Praja | Volume 6 M (Soleh Pulungan 2014), menemukan bahwa Kendala dalam implementasi SIMDA Keuangan dalam Jaringan dan kapasitas *bandwidth* yang terlalu kecil untuk jaringan tertentu sehingga koneksi antar SKPD dan Pemda tidak optimal. Hal ini mempengaruhi implementasi SIMDA Keuangan di Daerah Kutai Kartanegara. Penelitian Darea, D.W., & Elim, I berjudul Darea, D.W., & Elim, I., (2015). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Menemukan bahwa Perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut : sebelum menggunakan SIMDA Membutukan banyak waktu dalam penyajian Laporan Keuangan, Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan Laporan Keuangan karena tidak memiliki program rumus-rumus yang baku sehingga memungkinkan terjadi keterlambatan jadwal dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan sesudah penggunaan SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut Memiliki kecepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan karena menggunakan program komputerisasi yang memiliki program yang bekerja secara otomatis, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan Laporan Keuangan karena memiliki rumus-rumus yang telah diprogram secara otomatis. Penelitian Juddy Julian Pilat, Jullie J, Sondakh, Hendrik Manossoh, (2016) berjudul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado*, menemukan bahwa Komunikasi aktif telah dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan penerapan SIMDA Keuangan. Adanya komitmen pimpinan selaku pembuat kebijakan untuk memahami maksud dan tujuan penerapan kebijakan serta didukung dengan pemahaman bersama dari semua implementor tentang SIMDA Keuangan. Sosialisasi sebelum penerapan dan komunikasi selama penerapan dengan semua implementor pada Pemerintah Kota Manado dan juga pendampingan dari Tim Pengawasan BPKP Perwakilan Propinsi SULUT menjadikan aplikasi SIMDA Keuangan mampu dijalankan secara optimal. Penelitian (Nugraha 2013), dengan judul *analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)*, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan

daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dalam melaksanakan refocussing dan realokasi anggaran di BPKAD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya yakni menggunakan indikator efektivitas dari George H Bodnar (2000) yang menyatakan bahwa ukuran efektivitas yaitu Indikator Keamanan Data Berhubungan dengan kemampuan sistem informasi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem. Indikator Waktu Berhubungan dengan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan suatu sistem informasi dalam mengolah informasi menjadi sebuah laporan secara periodic maupun non periodik , untuk rentang waktu yang telah ditentukan. Indikator ketelitian Berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Indikator Variasi Laporan atau *Output* Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volmenya. Tingkat kemampuan sistem informasi dalam membuat laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai kebutuhan pengguna informasi. Indikator Relevansi Menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Hal ini menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dalam melaksanakan refocussing dan realokasi anggaran di BPKAD Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2014:7) Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dalam metode ini proses dalam penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola sehingga disebut metode artistik, kemudian data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi pada saat dilakukan penelitian lapangan sehingga disebut metode interpretive.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dilokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber data penulis diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P (*person, place & paper*). *Person* yaitu narasumber yang dijadikan informan oleh penulis, *Place* yaitu tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate, *Paper* dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan mengenai buku petunjuk teknis SIMDA, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Penulis melakukan teknik analisis data dengan langkah-langkah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 247-252) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perbendaharaan negara. Laporan Keuangan yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintahan Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai perubahan anggaran dalam hal ini pelaksanaan *refocussing* dan realokasi anggaran, posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sistem itu harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang sekarang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menjadikan dasar peraturan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada level pemerintah daerah.

Penggunaan SIMDA Keuangan di Kota Ternate sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan sangat membantu dalam pengelolaan keuangan terkhusus di BPKAD Kota Ternate telah memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh para pegawai dengan adanya SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi secara online di seluruh OPD di Kota Ternate maka tidak perlu lagi perwakilan masing-masing OPD untuk perwakilannya untuk menyampaikan informasi keuangan yang telah disusun karena seluruh seluruh informasi keuangan hanya perlu di input ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan yang telah menyediakan struktur atau format yang ada dan telah diatur keseragamannya.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Ternate telah berjalan secara efektif ditandai dengan memnuhi indikator efektifnya suatu sistem informasi menurut

George H. Bodnar yaitu keamanan data, waktu, ketelitian, variasi output atau laporan, dan relevansi data. Dari indikator keamanan data, penggunaan SIMDA Keuangan telah memenuhi pertimbangan perancangan sistem pengamanan data sehingga data yang akan diakses tanpa izin dan tanpa mengetahui password kode log in maka tidak dapat masuk sehingga tidak perlu dikhawatirkan data akan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab. Dari indikator waktu, penggunaan SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Ternate telah sesuai dengan tujuannya yaitu membantu percepatan perhimpunan data dan pelaporan keuangannya dengan sistem yang telah terintegrasi dengan seluruh OPD di Kota Ternate memberikan kemudahan dalam input data, pencarian data yang dibutuhkan, memproses data, menyajikan data, hingga mengirim dan menerima informasi atau data sangat bisa dipercaya karena kemampuan SIMDA Keuangan dalam menjalankan perintah bisa dikatakan cepat. Sama halnya dengan penelitian (Nugraha 2013), dengan judul *analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)*, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

Penggunaan SIMDA Keuangan dari indikator ketelitian, kesalahan dalam menginput data bukan menjadi masalah pada pengoperasian SIMDA Keuangan karena sejauh ini hal-hal tersebut masih bisa diatasi dan belum pernah terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan biarpun ada kesalahan tetap masih bisa diperbaiki oleh operator tetapi tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari indikator laporan, output dari SIMDA Keuangan ini tidak hanya lengkap sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010, namun juga memiliki kelebihan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan informasi keuangan daerah Kota Ternate, SIMDA Keuangan di BPKAD Kota Ternate juga menyediakan laporan keuangan dengan format yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing

OPD. Dari indikator relevansi data, SIMDA Keuangan membantu efisiensi dalam efisien waktu, dan juga efisien biaya karena dengan adanya SIMDA Keuangan maka seluruh OPD tidak perlu lagi mengirim perwakilan OPD untuk harus datang ke BPKAD untuk menyampaikan dan menghimpun informasi pelaporan keuangan karena SIMDA Keuangan sudah dibuat sedemikian rupa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga seluruh seluruh prosedur keuangan daerah dapat dilakukan dengan hanya mengklik menu yang telah disediakan oleh aplikasi SIMDA Keuangan.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian beserta pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate sudah berjalan secara efektif dan juga sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan. SIMDA Keuangan di Kota Ternate juga telah memenuhi indikator efektivitas sistem informasi yaitu keamanan data, waktu, ketelitian, variasi laporan atau output, dan Relevansi.
2. Faktor yang menghambat dalam efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate yaitu, masih perlunya perbaikan dan penambahan sarana untuk mendukung efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, masih dibutuhkannya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaksana/operator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, dan masih adanya sebagian penggunaan dengan cara manual dalam efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, sudah terlihat bahwa

BPKAD telah mengusahakan semaksimal mungkin dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan bimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan bagi setiap OPD. BPKAD juga telah menyediakan sarana pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan di setiap OPD, jadi dengan ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate telah mengusahakan agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dapat berjalan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa saran yang akan diberikan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:

1. Perlunya peningkatan pada pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan cara memberi pendampingan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate perlu menambah jadwal pelaksanaan bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada sebagai pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan.
3. Perlunya penambahan sarana pendukung serta perhatian khusus pada sarana yang telah ada seperti kecepatan jaringan agar memperlancar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan

penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah* Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta
- Bodnar, George H. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media Group: Jakarta
- Dadang suwanda, 2015. *Sistem akuntansi akrual pemerintah daerah berpedoman sap berbasis akrual*. PPM: Jakarta.
- Darmawan, Deni dan Fauzi , Nur Kunkun. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Gaol, Chr. Jimmy L. 2008. *Sistem Informasi Manajemen: Pemahaman dan Aplikasi*. Grasindo: Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Indrawan, Rully & Poppy Yuniawati. 2014. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Refika Aditama: Bandung
- Kumorotomo, Wahyudi dan Margono, Subando Agus. 2009. *Sistem Informasi Manajemen: dalam organisasi-organisasi publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Murdick, Robert G. 2012. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*. Erlangga: Jakarta
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Mukhtar , SE. MBIT. 2002. *Audit Sistem Informasi*. Rineka Cipta: Jakarta

- Sedarmayanti. 2018. *Komunikasi Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Siagian, Sondang P. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Jakarta
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Mandar Maju: Bandung
- Winarno, Wing Wahyu. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi 2*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta

a. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Permerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

b. Lain-lain

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp> diakses pada 3 Oktober 2020